

# **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste**

**(Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)**

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**DINA HARTIANI**

**NIM. 2020B1B057**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM  
ZERO WASTE  
( DI DESA BENGKEL KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN  
LOMBOK BARAT )**

Dina Hartiani<sup>1</sup>, Rossi Maunofa Widayat<sup>2</sup>, Ilham Zitri<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota besar maupun di kawasan padat penduduk. Khususnya dikawasan Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, masih terdapat tumpukan-tumpukan sampah dipinggir jalan maupun dilahan lahan yang kosong yang bukan menjadi TPS. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem *zero waste*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah NVivo, tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* umumnya sudah terlaksana dan direalisasi. Hal ini dapat dilihat dari (1) Perilaku hubungan antar organisasi di Desa Bengkel telah berjalan baik dengan komitmen pemerintah desa, tokoh masyarakat dalam merealisasikan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah dan koordinasi Pemerintah Desa dengan kepala dusun. (2) Perilaku Implementor Tingkat Bawah telah dilaksanakan hal ini dapat dilihat dari kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas para birokrat tingkat bawah. (3) Perilaku Kelompok Sasaran yaitu masyarakat memberikan respon positif dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah di desa Bengkel.

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* yaitu armada truk pengangkut sampah, fasilitas pengangkut sampah roda 3, fasilitas tong sampah dan tenaga sampah yang cukup. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kendala cuaca, kurang fasilitas pengangkut sampah atau argo, sosialisasi *zero waste* belum menyeluruh dan pembangunan TPS terkendala lokasi atau lahan.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, *Zero Waste*

**IMPLEMENTATION OF ZERO WASTE WASTE MANAGEMENT POLICY  
(IN BENGKEL VILLAGE, LABUAPI SUB-DISTRICT, WEST LOMBOK  
DISTRICT)**

Dina Hartiani<sup>1</sup>, Rossi Maunofa Widayat<sup>2</sup>, Ilham Zitri<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Waste problems have become a serious problem, especially in big cities and densely populated areas. Especially in the Bengkel Village area, Labuapi District, and West Lombok Regency, there are still piles of garbage on the side of the road and on empty land that is not a TPS. This research was conducted in Bengkel Village, Labuapi District, West Lombok Regency. This study aims to know the implementation of the zero waste management policy. This research uses qualitative methods. The data sources in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique in this research is NVivo, the data reduction stage, data presentation and conclusion drawing.*

*The results showed that the Implementation of the Zero Waste System Waste Management Policy has generally been implemented and realized. It can be seen from (1) The behaviour of inter-organizational relations in Bengkel Village has gone well with the commitment of the village government community leaders in realizing the Village Regulation on Waste Management and the coordination of the Village Government with the hamlet heads. (2) Lower Level Implementor Behavior has been implemented. It can be seen from the organizational control, work ethic, and professionalism of lower-level bureaucrats. (3) Target Group Behavior, namely the community, gives a positive response and supports the waste management policy in Bengkel village.*

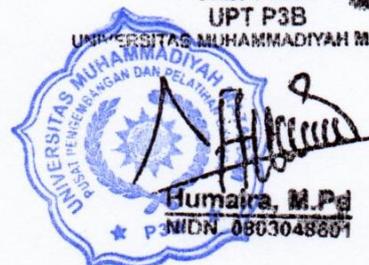
*Supporting factors in the Implementation of the Zero Waste System Waste Management Policy are the fleet of garbage trucks, 3-wheeled garbage transportation facilities, garbage can facilities, and sufficient waste workers. While the inhibiting factors in the Implementation of the Zero Waste System Waste Management Policy are lack of public awareness, weather constraints, lack of waste transportation facilities or meters, zero waste socialization has not been comprehensive, and the construction of TPS is constrained by location or land.*

**Keywords: Implementation, Policy, Zero Waste**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan sampah merupakan fenomena sosial yang belum mampu diatasi sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Setiap kota dan desa di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan kebiasaan konsumsi yang berbeda-beda pasti menghadapi permasalahan sampah ini akibat tingginya aktivitas masyarakat. Pola konsumsi dan jumlah penduduk yang demikian pada akhirnya dapat menyebabkan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah terus meningkat dan menjadi permasalahan karena tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik. Permasalahan sampah dapat teratasi apabila masyarakat dan pemerintah mampu dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah secara penuh tanggung jawab (Nurlina et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terdiri dari sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan industri dan lainnya, dan sampah spesifik yang biasanya mengandung bahan berbahaya (Always Syahputra et al., 2022).

Menurut Slamet (2002), sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dapat pula berupa proses alam berupa zat-zat organik atau anorganik padat atau semi padat yang dapat terurai secara hayati atau tidak dapat terurai, yang sudah tidak berguna lagi dan dibuang begitu saja terhadap lingkungan.

Penggunaan kemasan plastik sekali pakai merupakan salah satu contoh produksi sampah yang umum terjadi di masyarakat kita. Selain itu, masih banyak aktivitas alam dan manusia lainnya yang pada akhirnya menghasilkan limbah yang jika dibiarkan akan mengganggu aktivitas manusia dan merugikan alam (Pribadi et al., 2021).

Sampah yang ada disekitar kita sangatlah banyak jenisnya, misalnya sampah rumah tangga, sampah industri, sampah peternakan, sampah perkebunan, sampah pasar, sampah perkantoran dan komersial merupakan contoh sampah yang dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Untuk mengurangi jumlah sampah yang terus bertambah, berbagai metode telah diperkenalkan di pemerintah kota, seperti pembuatan kompos dan daur ulang sampah menjadi peralatan rumah tangga atau peralatan daur ulang lainnya. Namun pemanfaatan timbunan sampah tidak menimbulkan efek atau pergerakan serupa di masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan masih belum terlihat di masyarakat, sehingga masih banyak tumpukan sampah dimana-mana (Pribadi et al., 2021)

Permasalahan sampah di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan pemerintah karena didorong oleh pertumbuhan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah masih sangat rendah. Masih sering dijumpai sampah yang tidak pada tempatnya atau penduduk yang membuang sampah sembarangan. kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah masih rendah karena cara berpikir terhadap masalah sampah adalah tanggung jawab pemerintah. Padahal, jika hanya pemerintah saja tanpa partisipasi masyarakat, maka hal tersebut tidak ada artinya (Ahmad Zulhadenan, 2020)

Tabel 1.1 Data Sampah Nusa Tenggara Barat

No	Provinsi	Kabupaten	Proyeksi Sampah (ton/hari)	Rata-rata Sampah Tertangani (ton/hari)	Persentase
1.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	342,60	281,91	82,28
2.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	508,93	96,30	18,92
3.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	356,77	152,45	42,73
4.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	516,15	180,45	34,96
5.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	90,62	63,90	70,51
6.	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	188,76	97,40	51,60
7.	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	90,07	50,31	55,85
8.	Nusa Tenggara Barat	Dompu	102,94	64,40	62,56
9.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	386,65	46,20	11,95
10.	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	90,06	94,80	105,26
<b>Total Provinsi NTB</b>			<b>2.673,56</b>	<b>1.128,11</b>	<b>42,20</b>

Sumber : Artikel Publikasi Tahun 2022

Dari data diatas sampah di Nusa Tenggara Barat Tertinggi yakni Kota Bima 105,26%, kemudian Kota Mataram sebanyak 82,28%, sebanyak 70,51% Kabupaten Lombok Utara, 62,56% Kabupaten Dompu, 55,85% Kabupaten Sumbawa Barat, Sebanyak 51,60% Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah 42,73%, Kabupaten Lombok Timur 34,96%, sebanyak 18,92% Kabupaten Lombok Barat, dan sebanyak 11,95% Kabupaten Bima.

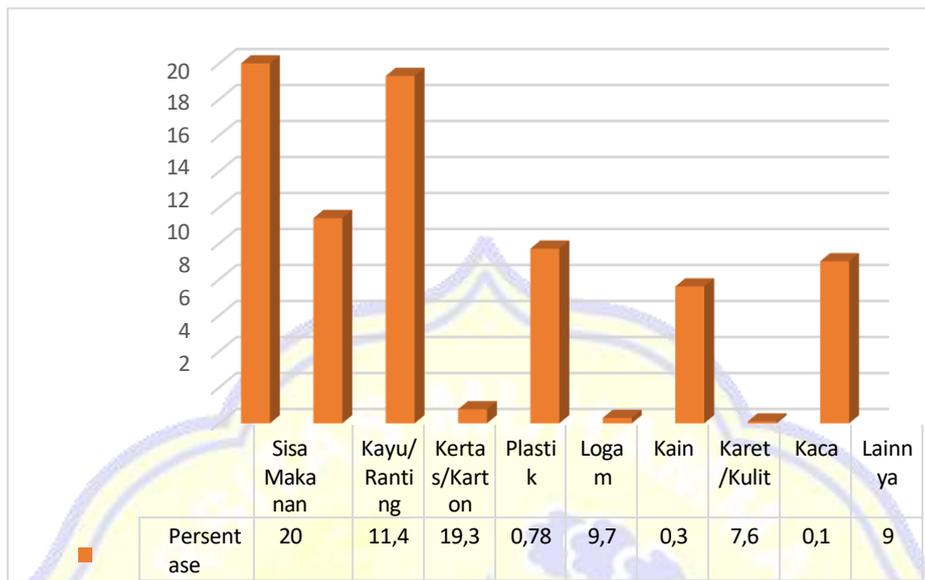
Dari data diatas sampah dikota Mataram sebanyak 82,28% hal ini dikarenakan masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB mempunyai program NTB *zero waste*, masyarakat

merasa program tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh oleh pemerintah sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Dukungan pemerintah, sumber daya anggaran, dan personel (SDM) menjadi faktor pendorong terlaksananya program zero waste ini, sedangkan disinsentifnya adalah kesadaran masyarakat serta sarana dan prasarana (Evayanti et al., 2022).

Dari data diatas sebanyak 18,92% sampah di Kabupaten Lombok Barat. hal ini dikarenakan prinsip pengelolaan sampah dengan Pembangunan tempat pembuangan sampah konsep 3R yaitu, *Reduce, Reuse dan Recycle* (mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang) atau TPS 3R yang merupakan salah satu upaya penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Lombok Barat. Pembangunan TPS 3R juga menjadi salah satu strategi dalam penerapan program *zero waste* khususnya di Lombok Barat dan NTB pada umumnya. Kehadiran TPS 3R dapat menjadi kegiatan pemberdayaan Masyarakat khususnya yang bernilai ekonomi yang menghasilkan pendapatan seperti pengomposan, daur ulang, dan untuk kerajinan tangan (grafikanews.com, 2020).

Sampah di Kabupaten Lombok Barat masih menjadi persoalan klasik yang belum mampu dituntaskan. Penanganan sampah terkendala jumlah armada dan kondisi cuaca, karena adanya acara keagamaan menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang didominasi sampah limbah rumah tangga (Bysuarantb.com, 2022).

Gambar 1.1 Persentase Timbulan Sampah Kabupaten Lombok Barat



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2022

Berdasarkan jenisnya, mayoritas timbulan sampah di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 berupa sampah sisa makanan sebanyak 20,00%. Selanjutnya sampah kertas atau karton terdapat pada urutan kedua dengan jumlah 19,30%. Sebanyak 11,40% berupa kayu atau ranting, 9,70% sampah logam, dan sampah karet atau kulit sebanyak 7,60%. Ada pula sebanyak 0,78% sampah plastik, sampah kain sebanyak 0,30%, sampah kaca 0.10% dan 9,00% sampah jenis lainnya

Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah di tingkat kota atau daerah, termasuk peran aktif pemerintah dan masyarakat. Daur ulang sampah kota merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan pemerintah secara maksimal. Pada dasarnya penerapan TPS 3R berorientasi pada konsep Reduce, Reuse dan Recycle yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah di tingkat masyarakat atau daerah

sehingga secara efektif mengurangi beban sampah yang diolah di TPA(Sumarab et al., 2022).

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan produksi sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, pengelolaan sampah harus dilakukan dari bawah ke atas. Permasalahan sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi permasalahan yang serius terutama di kota-kota besar dan daerah padat penduduk. Khususnya dikawasan Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, masih terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan atau di lahan kosong yang bukan TPS.

Pentingnya peneliti melakukan penelitian ini agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana permasalahan pengelolaan sampah sistem *zero waste* yang ada di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan juga bisa melihat sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah sistem *zero waste* yang direncanakan pemerintah diterapkan di Desa Bengkel, Kecamatan Labuap, Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan yang disampaikan, maka sudah selayaknya peneliti mengangkat judul, **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste (Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ?.
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ?.

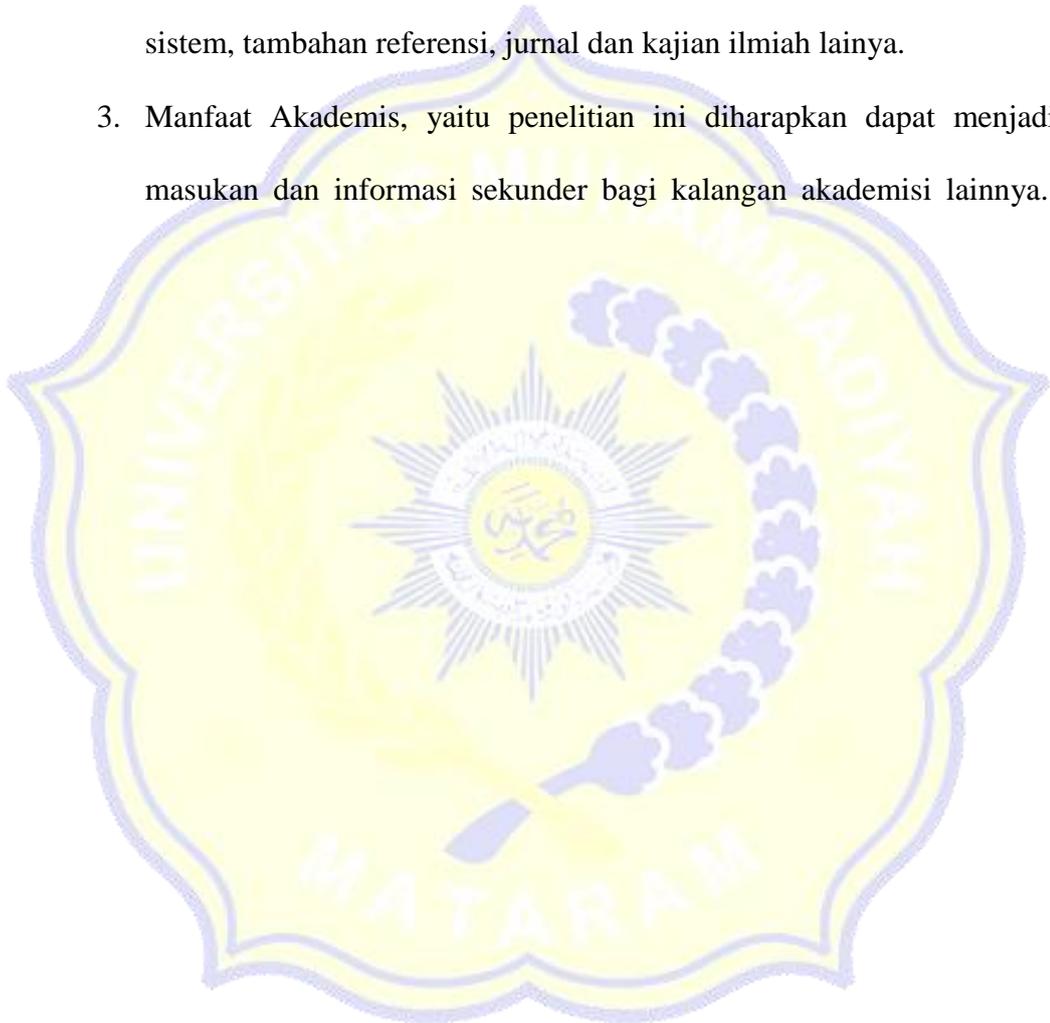
## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis untuk pemecahan masalah atau dapat di jadikan bahan untuk merumuskan kebijakan pembangunan, baik tingkat lokal, regional maupun nasional.
2. Manfaat teoritis sebagai bahan pengembangan Iptek, perbaikan sistem, tambahan referensi, jurnal dan kajian ilmiah lainnya.
3. Manfaat Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi sekunder bagi kalangan akademisi lainnya..



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **a. Perilaku Hubungan Antar Organisasi**

Perilaku hubungan antar organisasi di Desa Bengkel telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu komitmen dan koordinasi antar organisasi yang dilakukan, dengan di tetapkannya Peraturan Desa Bengkel No. 04 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah pada tanggal 31 Agustus akan menguatkan komitmen baik dengan masyarakat mulai dari tingkat RT, kepala dusun, pengelolan BUMdes maupun Pemerintah desa. Adapun koordinasi antar organisasi tetap dilakukan dengan mengadakan rapat rutin setiap 1 bulan sekali kepala dusun melaporkan terkait perkembangan ataupun kendala yang di hadapi sehingga indikator pertama yaitu perilaku hubungan antar organisasi telah dijalankan dalam merealisasikan kebijakan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

##### **b. Perilaku Implementor Tingkat Bawah**

Perilaku implementor tingkat bawah dimensinya adalah kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional. Adapun kontrol organisasi tetap dilakukan terutama dalam pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan, etos kerja dari para implementor tingkat bawah yaitu untuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan dan

norma-norma profesionalitas terus ditanamkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ditetapkan contohnya melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ke 3 indikator perilaku implementor tingkat bawah telah dijalankan oleh birokrat tingkat bawah, karena pelaksanaannya sudah berjalan dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Desa Bengkel No. 04 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah.

c. Perilaku Kelompok Sasaran

Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif Masyarakat ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh sekelompok sasaran, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu, respon positif dari masyarakat Desa Bengkel tentang pengelolaan sampah serta masyarakat sangat mendukung dan sudah sesuai harapan masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah maupun peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah ini sangat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah khususnya di daerah yang padat penduduk.

### **5.1.1 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem *zero waste* di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat**

Terdapat 4 faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem *zero waste* desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yaitu, armada truk pengangkutan sampah, fasilitas pengangkut sampah roda 3, fasilitas tong sampah dan tenaga sampah yang cukup. faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa Bengkel.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem *zero waste* di desa Bengkel diantaranya adalah, kurangnya kesadaran masyarakat, terkendala cuaca, kurangnya fasilitas pengangkut sampah atau argo, sosialisasi *zero waste* belum menyeluruh dan pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) terkendala lokasi atau lahan yang tidak tersedia.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan masalah yang ditemukan saat melakukan penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem *Zero Waste* : Pembangunan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Perlu di tingkatkan lagi SDM, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sosialisasi program *zero waste* dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Pemerintah maupun Pemerintah Desa diharapkan memfasilitasi, fasilitas pengangkut sampah seperti, Argo untuk kebutuhan pengangkutan sampah yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 3
3. Pemerintah dan pemerintah Desa lebih aktif melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah kepada masyarakat.